

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM MENGIKUTI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*

Oleh

SYAHRI MAHBENGI

NPM : 1305170433



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

\

ABSTRAK

SYAHRI MAHBENGI. NPM. 1305170433. Analisis *Value For Money* Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan konsep *Value for money* keuangan daerah tahun 2011-2015 dan dampak pengukuran menggunakan konsep *Value for money* terhadap APBD pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah berupa data-data Laporan realisasi anggaran yang cukup jelas untuk peneliti untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan Desember 2016 sampai bulan April 2017.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari konsep pengukuran *Value for money* kinerja pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah tahun 2011-2015 berdasarkan indikator rasio ekonomis tergolong kategori ekonomis rasionya berada diantara 90-100%, rasio efisiensi tergolong kategori kurang efisien rasionya berada diantara 90-10%, dan rasio efektivitas tergolong kategori efektif rasionya berada diantara 90-100%. Faktor-faktor yang menyebabkan belum terwujudnya *value for money* adalah meningkatnya rasio ekonomis disebabkan karena meningkatnya belanja daerah yang di anggarkan dan yang terealisasi tapi perbandingan selisihnya tidak signifikan, meningkatnya rasio efisiensi disebabkan karena realisasi belanja dan realisasi pendapatan perbandingan selisihnya tidak signifikan, rasio efektivitas target belanja dan realisasi belanja mengalami peningkatan tetapi realisasi pendapatan tidak pernah mencapai bahkan melebihi target yang terealisasi. Dampak dari pengukuran dengan konsep *value for money* terhadap APBD pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah adalah terhadap penyusunan APBD tahun selanjutnya, pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, pelayanan kepada masyarakat, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah agar keuangan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas adalah meningkatkan sumber pendapatan daerah dan menekan biaya untuk belanja.

Kata Kunci : *Value for money*, Pengukuran Kinerja Keuangan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin Segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan HidayahNya, serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dimana merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Hendara Dana Supari dan Alm Sabarudin dan ibunda tercinta Salmiyah dan Masniar, Serta adik saya Manda Sri Ayu yang merupakan inspirasi bagi si penulis, berjuang dengan segenap kemampuan dengan keterbatasan membesarkan, mendidik, memberi dorongan motivasi serta Do'a sehingga membawa penulis menjadi manusia yang berguna bagi keluarga.

2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela SE, M.Si selaku Ketua Jurusan program studi Akuntansi fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE, M.si selaku Sekretaris Jurusan program studi Akuntansi fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Henny Zurika Lubis SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Terima kasih Kepada Teman seperjuangan Dhiny Amalia, Novi Juwita, Monawaroh, Cici Wulandari yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun skripsi selanjutnya.

Medan, April 2017

Penulis

SYAHRI MAHBENGI

1305170433

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	11
1. Pengukuran Kinerja	11
1.1. Pengertian Pengukuran Kinerja	11
1.2. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	12
1.3. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	13
1.4. Indikator Pengukuran Kinerja.....	13
2. Informasi Yang Di Gunakan Dalam Pengukuran Kinerja	15
3. Value For Money	18
3.1. Pengertian <i>Value For Money</i>	17
3.2. Indikator <i>Value For Money</i>	22
3.3. karakteristik indikator <i>Value for money</i>	23
3.4. Manfaat Implementasi <i>Value For Money</i>	23
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Berfikir.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Definisi Operasional.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
D. Jenis Data	32
E. Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data	33

G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	35
1. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011-2015	35
2. Pengukuran Kinerja Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah.....	39
3. Pengukuran <i>Value For Money</i>	39
3.1 Rasio Ekonomis	39
3.2 Rasio Efisiensi.....	42
3.3 Rasio Efektivitas	45
B. Pembahasan	50
1. Pengukuran Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah berdasarkan <i>Value For Money</i>	50
2. Faktor –faktor yang menyebabkan belum terwujudnya <i>Value For Money</i> dalam pengelolaan APBD.	53
3. Dampak pengukuran berdasarkan Konsep Value For Money terhadap APBD.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Laporan Realisasi Anggaran.....	3
Tabel I-2	Laporan Realisasi Anggaran.....	3
Tabel I-3	Laporan Realisasi Anggaran.....	4
Tabel II-1	Kriteria Ekonomis	21
Tabel II-2	Kriteria Efisiensi.....	22
Tabel II-3	Kriteria Efektivitas	23
Tabel II-4	Penelitian Terdahulu	20
Tabel III-1	Waktu Penelitian	28
Tabel I-1	Laporan Realisasi Anggaran.....	35
Tabel I-2	Laporan Realisasi Anggaran.....	36
Tabel I-3	Laporan Realisasi Anggaran.....	36
Tabel V-1	Rasio Ekonomis.....	40
Tabel V-2	Rasio Efisiensi.....	43
Tabel V-3	Rasio Efektivitas.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	Konsep <i>Value for money</i>	18
Gambar II-1	Kerangka Berfikir	28
Gambar V-1	Grafik Rasio Ekonomis.....	42
Gambar V-2	Grafik Rasio Efisiensi	45
Gambar V-3	Grafik Rasio Efektivitas.....	48
Gambar V-1	Grafik konsep <i>Value for money</i>	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang Masalah

Pada era reformasi keuangan daerah, diisyaratkan agar laporan keuangan semakin inovatif . Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa : pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat).

Sejak di berlakukannya undang-undang No.22 tahun 1999, tentang pelaksanaan otonomi daerah, maka terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai di laksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintahan daerah yang memiliki sumber daya alam yang sedikit khawatir. Kekawatiran ini di sebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya .

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat di lihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang di beri wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya.

Kabupaten Bener Meriah terletak di Provinsi Aceh, yang di beri kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Bener Meriah maka di harapkan Kabupaten Bener Meriah mampu menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Anggaran dan Realisasi Daerah Kabupaten Bener Meriah Periode 2011-2015 sebagai berikut :

Tabel I.1
Laporan Realisasi Anggaran
Kabupaten Bener Meriah
Periode 2011 dan 2012

Uraian	2011		2012	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Reaisasi
Pendapatan Daerah	467.947.586.986	436.769.779.981	495.532.780.976	448.856.002.163
Pendapatan Asli Daerah	20.002.066.122	13.046.219.297	20.671.073.331	15.155.079.245
Pendapatan Transfer	428.224.817.768	394.269.059.588	431.590.851.645	407.180.195.238
Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah	19.720.703.096	29.454.501.096	43.270.856.000	26520.727.680
Belanja	464.993.480.412	432.940.294.034	496.610.409.764	448.100.090.205
Belanja Operasi	341.515.176.031	319.744.499.712	399.531.492.545	371.059.851.344
Belanja Modal	119.393.829.381	109.128.825.802	93.842.917.219	74.610.296.861
Belanja Tak Terduga	4.084.475.000	4.066.968.520	3.236.000.000	2.429.942.000
Penerimaan Daerah	1.045.893.426	1.048.142.841	1.577.628.788	1.577.628.788
Pengeluaran Daerah	4.000.000.000	3.300.000.000	500.000.000	300.000.000
Pembiayaan	(2.954.106.574)	(2.251.857.159)	1.077.628.788	1.277.628.788

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah

Tabel I.2
Laporan Realisasi Anggaran
Kabupaten Bener Meriah
Periode 2013 dan 2014

Uraian	2013		2014	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Reaisasi
Pendapatan Daerah	539.963.344.991	525.853.728.871	745.955.340.435	721.884.041.333
Pendapatan Asli Daerah	29.455.491.019	18.918.704.154	53.497.647.186	44.090.831.965
Pendapatan Transfer	470.258.801.972	466.686.047.717	549.627.544.197	545.565.220.472
Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah	40.249.052.000	40.248.977.000	142.830.149.051	132.227.988.896
Belanja	513.465.732.664	486.904.791.322	745.368.916.825	707.548.249.377
Belanja Operasi	387.906.835.902	368.944.879.285	502.267.481.611	470.936.834.356
Belanja Modal	123.558.896.762	116.041.361.587	242.431.435.214	235.990.600.021
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000	1.918.550.450	670.000.000	620.815.000
Penerimaan Daerah	2.033.540.747	2.033.540.747	12.452.325.222	12.452.325.222
Pengeluaran Daerah	28.531.153.074	28.530.153.074	13.038.748.833	11.739.575.955
Pembiayaan	(26.497.612.326)	(26.496.612.326)	(856.423.610)	712.749.267

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah

Tabel I.3
Laporan Realisasi Anggaran
Kabupaten Bener Meriah
Periode 2015

Uraian	2015	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	853.475.688.233	831.365.323.105
Pendapatan Asli Daerah	64.113.878.433	54.627.484.740
Pendapatan Transfer	668.986.999.225	656.196.191.815
Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah	120.374.810.575	120.541.646.550
Belanja	865.316.366.593	823.568.951.806
Belanja Operasi	615.024.641.984	583.911.772.555
Belanja Modal	248.091.724.609	237.458.856.251
Belanja Tak Terduga	2.200.000.000	2.198.323.000
Penerimaan Daerah	16.840.678.360	16.014.415.612
Pengeluaran Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembiayaan	11.840.678.360	11.014.415.000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah

Pada tabel-tabel di atas menjelaskan bahwa Anggaran periode 2011 sampai 2015 tidak sepenuhnya terealisasi, baik dari segi Pendapatan maupun Belanja tetapi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari sektor pendapatan baik target yang di anggarkan maupun yang terealisasi lebih di kontribusi oleh pendapatan transfer, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah kurang mampu mengelola sumber pendapatan daerah yang ada dan lebih mengandalkan pendapatan transfer yang bersumber dari Pusat maupun Provinsi dalam memperoleh Pendapatannya Daerahnya serta kurang memanfaatkan potensi alam yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Dari sektor Belanja juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dari yang di targetkan maupun yang terealisasi akan tetapi Lebih di kuasai oleh Belanja Operasional di bandingkan dengan Belanja Modal, hal ini menggambarkan belanja di daerah kabupaten Bener Meriah belum merata di

setiap sektornya dan dapat mengakibatkan lambatnya pembangunan infrastruktur untuk pelayan kepada masyarakat.

Dari data-data di atas menggambarkan kemampuan Pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya masih minim karena perubahan peningkatan yang dianggarkan setiap tahunnya masih belum signifikan hal ini berdampak dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak terealisasi sepenuhnya dari tahun-tahun sebelumnya, dan berdampak juga terhadap peningkatan Pendapatan Transfer setiap tahunnya yaitu bantuan dari pemerintah pusat. Seharusnya untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya pemerintah Kabupaten Bener Meriah harus lebih berani dan mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas berangsur-angsur mulai teratasi. Memang kebanyakan kota-kota kecil di seluruh Indonesia masih belum bisa mandiri dalam hal pengelolaan kinerjanya. Banyak pejabat-pejabat daerah yang justru berbuat tidak semestinya dengan melakukan berbagai penyimpangan, yang bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk itulah peran masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Sebagaimana di atur dalam undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah dan Pemerintah Daerah timbul hak daerah yang dapat di nilai dengan uang sehingga perlu di

kelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, dan di keluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan tersebut juga di tunjang dengan keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk lebih melengkapi sistem.

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayunigtyas Hertianti (2010;158) “Pengukuran Kinerja adalah instrumen yang di gunakan untuk menilai hasil ahir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah di tetapkan sebelumnya”.

Untuk mengukur tingkat kinerja dari pemerintahan dapat di lakukan berdasarkan pengukuran *Value for money*. Menurut Indra Bastian (2006;335) “*value for money* merupakan konsep yang meliputi penilaian Ekonomis, Efektivitas dan Efisiensi dalam pengukuran kinerjanya”.

Menurut Mardiasmo (2009:7) tujuan dari pengukuran kinerja dengan menggunakan *Value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan juga dapat memperbaiki kinerja dari pemerintahan yang di ukur dengan indikator ekonomis, efisiesi, dan efektivitas.

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang di capai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik. Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015;275).

Tabel I.4

Kriteria Ekonomis kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 100 %	Ekonomis
Sama dengan 100%	Ekonomis Berimbang
Lebih dari 100 %	Tidak Ekonomis

Sumber : *Mohammad Mahsun, 2006.*

Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015;275). Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisien apabila rasio yang di capai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Tabel I.5

Kriteria Efisiensi kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60 - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : *keputusan Mendagri No.690.900-327 tahun 1996.*

Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015;275) di katagorikan efektif apabila rasio apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel I.6

Kriteria Efektivitas kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

Penelitian ini pernah di lakukan oleh Peneliti sebelumnya, oleh Demi Aulia Arfan (2014), yang mana hasil penelitiannya mengenai Kinerja Dinas Pertanian Daerah Yogyakarta menunjukkan bahwa Rasio Ekonomi dapat di ketahui priode tahun 2011 dan 2012 Dinas Pertanian Daerah Yogyakarta telah mampu melaksanakan seluruh program dengan ekonomis, Dari Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Daerah Yogyakarta telah melaksanakan program dengan efisien, sementara Rasio Efektivitas Dinas Pertanian Daerah Yogyakarta telah melaksamakan program dengan efektif dengan rasio efektivitas mencapai 100%.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :” **Analisis *Value for Money* dalam mengukur kinerja Keuangan Pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber Pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan Pendapatan Transfer.
2. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
3. Masih tingginya jumlah belanja operasi dari pada belanja modal daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah jika di ukur menggunakan *Value For Money*?
2. Bagaimana dampak pengukuran berdasarkan konsep *Value for money* terhadap APBD kabupaten Bener Meriah.?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat Kinerja keuangan kabupaten Bener Meriah jika dilakukan dengan menggunakan pengukuran *Value For Money*.

2. Untuk mengetahui apa dampak pengukuran berdasarkan konsep *Value for money* terhadap APBD kabupaten Bener Meriah.?

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan *Value for money* dalam mengukur kinerja keuangan daerah.

2. Bagi Pemerintahan Daerah

Sebagai masukan tolak ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Pihak Lain

Sebagai bahan refrensi dan informasi yang dapat di gunakan untuk bahan penelitian dan perbandingan bagi peneliti yang meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengukuran Kinerja

1.1 Pengertian pengukuran kinerja

Menurut Mardiasmo (2009,hal;121) Pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui ala tukur financial dan non financial.

Sementara itu Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015,hal;271) pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan ke arah pencapaian tujuan melalui hasil-hasil yang di tampilkan baik berupa produk, jasa maupun suatu proses.

Sedangkan menurut Nordiawan dan Hertianti (2010,hal;158) Pengukuran kinerja adalah instrumen yang di gunakan untuk menilai hasil ahir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang di tetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu proses atau sistem yang mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan sebelumnya.

1.2 Tujuan pengukuran kinerja

Menurut Mahmudi (2007;14) mengidentifikasi tujuan di lakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu:

1. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai
3. Memperbaiki kinerja untuk untuk priode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*
5. Memotivikasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas publik

Menurut Mardiasmo (2009;121) Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik di lakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu:

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan pengukuran kinerja dapat di simpulkan yaitu :

3. Mengetahui tingkat pencapaian organisasi
4. Memperbaiki kinerja untuk priode berikutnya.
5. Meotivasi pegawai
6. Untuk mengalokasi sumber daya dan pembuatan keputusan.
7. Menciptakan akuntabilitas publik.

1.3 Manfaat pengukuran kinerja

Menurut mardiasmo (2009;122) manfaat pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang di ukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah di sepakati
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki organisasi
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan di lakukan secara obyektif.

1.4 Indikator Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan

organisasi Pemda. Menurut Mohamad Mahsun (2012;196) indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi :

- 1) Indikator Masukan (Inputs), misalnya :
 - a) Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c) Jumlah infra struktur yang ada
 - d) Jumlah waktu yang digunakan
- 2) Indikator Proses (Proses), misalnya :
 - a) Ketaatan pada peraturan perundangan
 - b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau atau menghasilkan jasa
- 3) Indikator Keluaran (Output), misalnya :
 - a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
- 4) Indikator Hasil (Outcome), misalnya :
 - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai
- 5) Indikator Manfaat (Benefit), misalnya :
 - a) Tingkat kepuasan masyarakat
 - b) Tingkat partisipasi masyarakat
- 6) Indikator Impact, misalnya :
 - a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b) Peningkatan pendapatan masyarakat

1.5 Kendala Dan Tantangan Pengukuran Kinerja

Menurut Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015;271) ada beberapa kendala pengukuran kinerja organisasi sektor publik antara lain :

- a) Pengukuran kinerja sektor publik tidak bisa dinilai hanya berdasar rasio-rasio keuangan, karena tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba.
- b) Output berupa pelayanan biasanya bersifat kualitatif, *intangibile* dan *indirect* sehingga sulit di ukur.
- c) Antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung (*disrectionary cost center*) karena sulitnya menetapkan standar sebagai tolak ukur produktivitas.
- d) Tidak beroperasi berdasarkan *market forces* sehingga tidak ada pembanding yang independen dan memerlukan instrumen pengganti mekanisme pasar dalam mengukur kinerja.
- e) Mengukur kepuasan masyarakat yang heterogen dari jasa pelayanan organisasi sektor publik tidak mudah dilakukan.

2. Informasi yang yan di gunakan dalam pengukuran kinerja

1. Informasi Finansial

Penilaian laporan kerja finansial di ukur berdasarkan anggaran yang telah di buat, dimana pengukurannya di lakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang di anggarkan.

Analisis Varian secara garis besar berfokus pada :

1) Varian pendapatan

Varian pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan undang undang No.23 tahun 2004 sumber pendapatan daerah ada tiga yaitu :

- 2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari, Pajak daerah,Retribusi daeah,Bagian laba usaha daerah,Lain lain pendapatan asli daerah.
- 2.2 Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil,Dana alokasi umum (DAU),Dana alokasi khusus (DAK).
- 2.3 Lain-lain pendapatan daerah yang syah meliputi Hibah, Dana darurat,Bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten,Dana penyesuaian,Dana otonomi khusus,Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

2) Varian Pengeluaran`

Varian pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari :

2.1 Varian belanja Rutin

Anggaran belanja rutin merupakan anggaran yang di sediakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat lancar, rutin dan secara terus menerus yang dimaksudkan untuk

menjaga kelemahan roda pemerintahan dalam memelihara hasil hasil pembangunan.

2.2 Varian belanja bangunan

Anggaran pembelanjaan bangunan adalah anggaran yang di sediakan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang ingin di capai. Pengeluaran yang di anggarkan dalam pengeluaran pembangunan di dasarkan atas alokasi sektor industri, pertanian, kehutanan, hukum, transportasi, dan lain sebagainya (Abdul Halim, 2004 ; 223-226)

2. Informasi Nonfinansial

Informasi Nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas kerja manajemen, informasi nonfinansial biasanya di gunakan dalam pengukuran kinerja dalam menggunakan *balanced scorecard* (Mardiasmo,2009;hal 123).

Informasi lingkungan eksternal dan internal, pembelajaran dan pertumbuhan serta nonfinansial (dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau sering di sebut dengan *key success faktor*).

3. *Value For Money*

3.1 Pengertian *Value For Money*

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat di nilai dari dari output yang di hasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input,output dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu di tambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*)

Menurut Mardiasmo (2009, hal;133) “*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaanya di minimalkan dan hasilnya di maksimalkan, dan efektivitas (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*”.

Value For Money merupakan konsep penting di dalam organisasi sektor publik di mana value for money memiliki pengertian terhadap nilai uang. *Value for money* yang merupakan pengukuran kinerja yang di gunakan perusahaan publik (Mahmudi,2011;89)

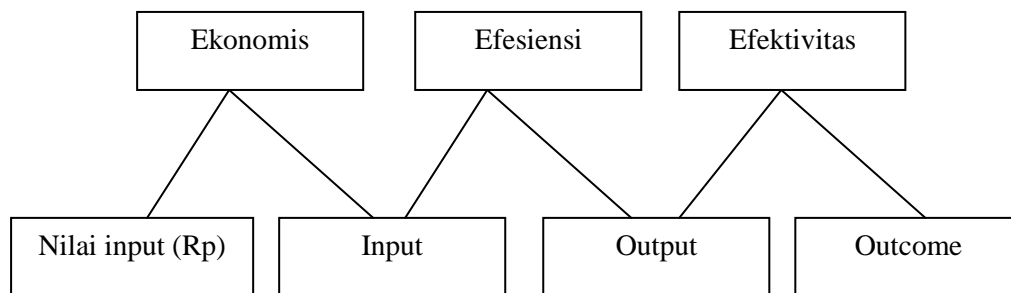
Menurut Indra Bastian (2006: 335) “*Value For Money* merupakan konsep yang meliputi penilaian Ekonomis,Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pengukuran Kinerja nya . Tujuan *Value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah (Mardiasmo,2009:7).

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah dan merupakan indikator yang memberikan

informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang di belanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pengukuran *Value for money* adalah konsep pengukuran terhadap perusahaan sektor publik yang didalamnya meliputi penilaian ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

Secara sistematis, *Value for money* dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1 Konsep *Value for money*

Berikut akan di jelaskan konsep *Value for money* yang dikenal dengan 3 E.

a. Rasio Ekonomis

Konsep Ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang di pergunakan, ekonomi merupakan ukuran relatif.

Suatu kegiatan operasional dapat di katakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015, hal 275). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-

data anggaran biaya dan realisasi biaya. Teknik analisis untuk mengukur tingkat ekonomis adalah:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang di capai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik

Tabel II.1

Kriteria Ekonomis kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 100 %	Ekonomis
Sama dengan 100%	Ekonomis Berimbang
Lebih dari 100 %	Tidak Ekonomis

Sumber : *Mohammad Mahsun, 2006.*

b. Rasio Efisiensi

Menurut Noerdiawan dan Hertianti (2010, hal 161) “Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan dari sebuah aktivitas dengan sumber daya yang di gunakan”. Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan *value for money* , rasio efisiensi menggambarkan antara besarnya biaya yang di keluarkan dengan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang di terima. Rasio Efisiensi di rumuskan dengan :

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisien apabila rasio yang di capai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Tabel II.2

Kriteria Efisiensi kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60 - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : keputusan Mendagri No.690.900-327 tahun 1996.

c. Rasio Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009, hal 134) “ Rasio Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besarnya biaya Yang telah di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah yang anggarkan, Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah di di tetapkan.

Teknik analisis yang di gunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah rasio Efektivitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan targetnya. Rasio Efektivitas di rumuskan dengan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalani tugasnya di katagorikan efektif apabila rasio apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel II.3

Kriteria Efektivitas kinerja keuangan dan Persentase kinerja keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 % keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

3.2 Indikator *Value For Money*

Indikator *Value for money* di bagi menjadi dua bagian yaitu (Mardiasmo,2009)

1) Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu dan harga terbaik. Efisiensi artinya *output* tertentu dapat di capai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.

2) Indikator kualitas pelayanan (Efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Dapat di simpulkan bahwa tiga indikator prestasi organisasi sektor publik adalah ekonomi mengenai input, efisiensi mengenai input dan

output, dan efektivitas berhubungan dengan output dan outcome. Menurut Halim dan Kusufi (2013:136) konsep dasar indikator input adalah semua jenis sumber daya masukan yang di gunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output.

3.3 Karakteristik indikator *Value for Money*

Menurut mahmud (2011;97) menyatakan bahwa indikator kinerja yang di kembangkan hendaknya memiliki karakteristik seperti yang di jelaskan antara lain :

1. Sederhana dan mudah dipahami.
2. Dapat diukur.
3. Dapat dikuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase dan angka.
4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja.
5. Berfokus kepada *customer service*, kualitas dan efisiensi
6. Dikaji secara teratur.

3.4 Manfaat Implementasi *Value For Money*

Penerapan konsep *Value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang di kehendaki dalam pelaksanaan *value for money* pada organisasi sektor publik yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi dalam sumber daya,

efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo 2009:103).

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya implementasi *value for money* adalah :

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang di berikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- 3) Menurunnya biaya pelayanan publik kinerja, inefisiensi dan terjadinya penghambatan dalam penggunaan input.
- 4) Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai alat pelaksanaan akuntabilitas publik.

Dari berbagai manfaat yang di sebutkan di atas, dapat di simpulkan bahwa penerapan *value for money* dalam pengukuran kinerja sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan pada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga tercipta mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber dana yang ekonomis dan efisien.

B. Penelitian Terdahulu

Table II . 4
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Joko Pramono (2012)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)	Variabel: Kinerja keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Rasio Kekeragaman, Rasio Pertumbuhan, Rasio DSCR	Hasil Analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian.
Bahrn Assidiqi (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”.	Variabel: Kinerja Keuangan, APBD	Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, Meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal.

Fitriyah Agustin (2007)	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)	Variabel: Kinerja Keuangan Rasio pertumbuhan, rasio aktivitas, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Debt Service Coverage Ratio	berdasar Rasio Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD. Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya.
----------------------------	---	--	---

C. Kerangka Berpikir

Menganalisis Kinerja Keuangan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu, Data yang di gunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2015 yang bersumber dari Dinas Pengeloaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bener meriah dan Peneliti melakukan penelitian dengan pengukuran *value for money* .

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah dan merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang di belanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Berikut akan di jelaskan konsep *Value for money* yang dikenal dengan 3 E.

Rasio Ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang di capai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik.

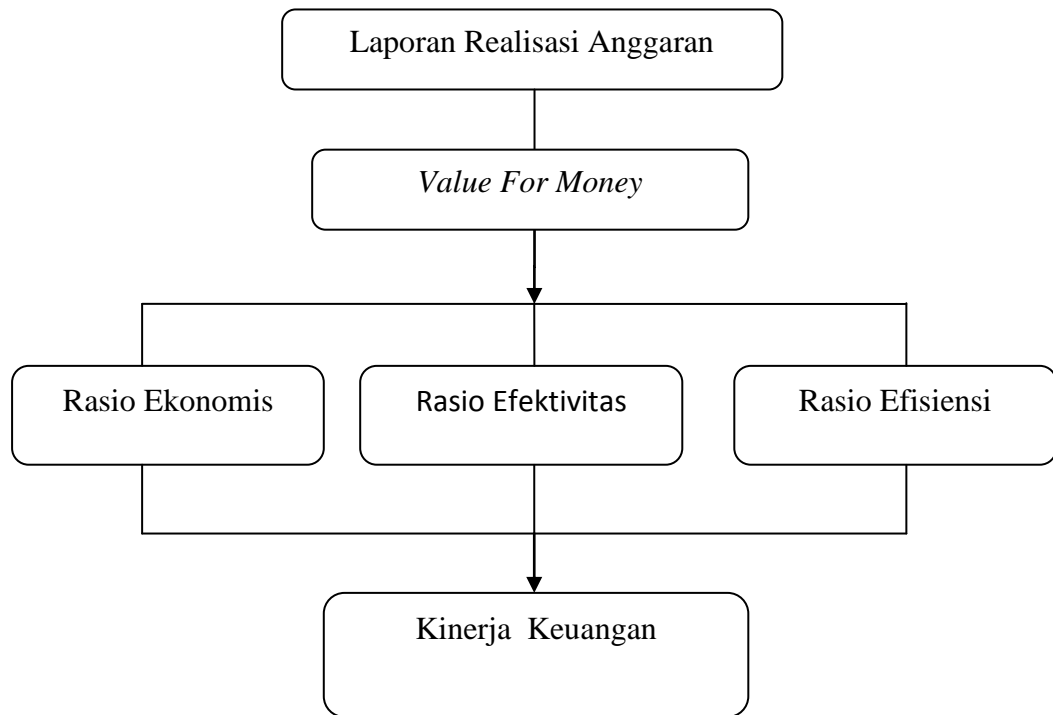
Rasio Efektivitas menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan targetnya. Kemampuan daerah dalam menjalani tugasnya di katagorikan efektif apabila rasio yang di capai melebihi seratus pesen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio Efisiensi menggambarkan antara besarnya biaya yang di keluarkan dengan realisasi pendapatan yang di terima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisien apabila rasio yang di

capai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bener Meriah. Jika semua rasio di atas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Bener Meriah dapat dikatakan baik.

Berikut ini di tampilkan kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar II.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang di terima dari Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah berupa data laporan realisasi anggaran sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas kepada penulis untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Sugiyono (2012 hal 13) Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional itu adalah defenisi yang menjelaskan bagaimana variabel itu dapat di ukur, dengan memberi arti atau penjelasan kegiatan dengan tujuan untuk melihat pentingnya variabel yang di gunakan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nantinya.

1. Value For Money

Value for money merupakan pengukuran kinerja pemerintah yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran yang di belanjakan

menghasilkan suatu manfaat bagi masyarakatnya. Berikut akan di jelaskan konsep *Value for money* yang dikenal dengan 3 E.

a. Rasio Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya.

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi membandingkan antara besarnya biaya yang di keluarkan dengan pendapatan yang terealisasi.

c. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan targetnya.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Keuangan merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan ke arah pencapaian tujuan melalui hasil-hasil yang di tampilkan baik berupa produk jasa maupun suatu proses.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah , yang bertempat di Jalan.

Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda-Redelong Kabupaten Bener Meriah
 .Aceh– Indonesia 24581, Telpn (0643)7426255, Email : dpkkm@gmail.com.

2.Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-1

Waktu Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Riset																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Perbaikan Proposal																				
6	Penyusunan Skripsi																				
7	Sidang Meja Hijau																				

D. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yaitu:

- a. Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah periode 2011 sampai 2015.
- b. Data Kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa obsevasi langsung ke kabupaten Bener Meriah mengenai APBD yang diselenggarakan.

E. Sumber Data

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer atau data pokok merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung ke objek penelitian. Data primer ini dikumpulkan dari hasil observasi terkait realisasi pendapatan asli daerah dari target yang ditetapkan, dan data klasifikasi pendapatan asli daerah di kabupaten Bener Meriah, yaitu berupa pertanyaan yang diberikan kepada pimpinan atau pegawai yang bertanggung jawab dibidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah

F. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Observasi

Yaitu pengamatan penelitian dengan cara peninjauan langsung ke Daerah Kabupaten Bener Meriah.

b) Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah berupa data Laporan Realisasi Anggaran periode 2011-2015.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif , yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data sehingga dapat memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang di teliti. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data dari objek penelitian.
2. Mencari teori yang mendukung analisis penelitian.
3. Menganalisis data yang ada dengan menggunakan pengukuran *Value For Money*.
4. Membahas tingkat Rasio Ekonomis, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi dalam mengukur kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011-2015

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah adalah laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi dan target anggaran dalam tahun 2011 sampai 2015, Laporan Realisasi Anggarannya sebagai berikut :

Tabel IV.1
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah
Periode 2011 dan 2012

Uraian	2011		2012	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Reaisasi
Pendapatan Daerah	467.947.586.986	436.769.779.981	495.532.780.976	448.856.002.163
Pendapatan Asli Daerah	20.002.066.122	13.046.219.297	20.671.073.331	15.155.079.245
Pendapatan Transfer	428.224.817.768	394.269.059.588	431.590.851.645	407.180.195.238
Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah	19.720.703.096	29.454.501.096	43.270.856.000	26520.727.680
Belanja	464.993.480.412	432.940.294.034	496.610.409.764	448.100.090.205
Belanja Operasi	341.515.176.031	319.744.499.712	399.531.492.545	371.059.851.344
Belanja Modal	119.393.829.381	109.128.825.802	93.842.917.219	74.610.296.861
Belanja Tak Terduga	4.084.475.000	4.066.968.520	3.236.000.000	2.429.942.000
Penerimaan Daerah	1.045.893.426	1.048.142.841	1.577.628.788	1.577.628.788
Pengeluaran Daerah	4.000.000.000	3.300.000.000	500.000.000	300.000.000
Pembiayaan	(2.954.106.574)	(2.251.857.159)	1.077.628.788	1.277.628.788
SILPA	0	1.577.628.788	0	2.033.540.747

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah

Tabel IV.2
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah
Periode 2013 dan 2014

Uraian	2013		2014	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Reaisasi
Pendapatan Daerah	539.963.344.991	525.853.728.871	745.955.340.435	721.884.041.333
Pendapatan Asli Daerah	29.455.491.019	18.918.704.154	53.497.647.186	44.090.831.965
Pendapatan Transfer	470.258.801.972	466.686.047.717	549.627.544.197	545.565.220.472
Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah	40.249.052.000	40.248.977.000	142.830.149.051	132.227.988.896
Belanja	513.465.732.664	486.904.791.322	745.368.916.825	707.548.249.377
Belanja Operasi	387.906.835.902	368.944.879.285	502.267.481.611	470.936.834.356
Belanja Modal	123.558.896.762	116.041.361.587	242.431.435.214	235.990.600.021
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000	1.918.550.450	670.000.000	620.815.000
Penerimaan Daerah	2.033.540.747	2.033.540.747	12.452.325.222	12.452.325.222
Pengeluaran Daerah	28.531.153.074	28.530.153.074	13.038.748.833	11.739.575.955
Pembiayaan	(26.497.612.326)	(26.496.612.326)	(856.423.610)	712.749.267
SILPA	(0)	12.452.325.222	0	15.048.541.223

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah

Tabel IV.3
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah
Periode 2015

Uraian	2015	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	853.475.688.233	831.365.323.105
Pendapatan Asli Daerah	64.113.878.433	54.627.484.740
Pendapatan Transfer	668.986.999.225	656.196.191.815
Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah	120.374.810.575	120.541.646.550
Belanja	865.316.366.593	823.568.951.806
Belanja Operasi	615.024.641.984	583.911.772.555
Belanja Modal	248.091.724.609	237.458.856.251
Belanja Tak Terduga	2.200.000.000	2.198.323.000
Penerimaan Daerah	16.840.678.360	16.014.415.612
Pengeluaran Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembiayaan	11.840.678.360	11.014.415.000
SILPA	0	18.810.786.912

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah

Pada tabel Laporan Realisasi Anggaran di atas menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah meliputi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan baik dari segi

yang di anggarkan maupun yang terealisasi. Pendapatan daerah kabupaten Bener Meriah berasal dari tiga sumber yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari hasil kekayaan yang dimiliki daerah kabupaten Bener Meriah yang mana meliputi Pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hsl pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang syah, dan zakat.
2. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang meliputi : Pendapatan pemerintah pusat-Dana perimbangan, dana bagi hasil bukan pajak dan DBH bukan pajak (SDA), dana alokasi umum, dana alokasi khusus, Pendapatan bagi hasil pajak.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang syah meliputi DBH dari provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian dan Otsus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya, pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya.

Sedangkan Belanja daerah kabupaten Bener Meriah tahun 2011 sampai 2015 juga mengalami peningkatan baik yang di anggarkan maupun yang terealisasi. Belanja daerah yang di kabupaten Bener Meriah terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan belanja yang di dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah dalam menjalankan roda pemerintahannya yang mana belanja operasinya meliputi : Belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, subsidi, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemerliharaan.

2. Belanja modal merupakan belanja yang di keluarkan untuk pembangunan dan pelayanan kepada publik, belanja modal meliputi : belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja bangunan gedung, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya.
3. Belanja tak tertuga merupakan belanja yang dilakukan diluar dari belanja yang telah di rencanakan yang meliputi belanja tak terduga.

Pembiayaan bersih daerah kabupaten Bener meriah dari tahun 2011 dan 2013 mengalami minus hal ini di sebabkan karena pengeluaran daerah lebih besar di bandingkan pendapatan daerah, sedangkan tahun 2012, 2014, dan 2015 pembiayaan bersih daerah baik karena pendapatan daerah lebih besar di bandingkan dengan pengeluaran daerah. Pembiayaan daerah kabupaten Bener Meriah meliputi :

1. Penerimaan daerah meliputi SILPA, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah dan pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat.
2. Pengeluaran daerah meliputi penyertaan modal pemerintah daerah, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, dan sisa perhitungan tahun berjalan.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) kabupaten Bener Meriah tahun 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mana di sebabkan kareana selisish antara surplus (pendapatan daerah lebih besar di bandingkan belanja daerah) lebih besar di bandingkan dengan pembiayaan bersih.

2. Pengukuran Kinerja yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten

Bener Meriah.

Berdasarkan hasil wawancara Pengukuran kinerja yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten bener meriah tahun 2011 sampai 2015 dan seterusnya dilakukan oleh BPS kabupaten Bener Meriah yang mana pengukuran dilakukan dari segala aspek baik dari segi pendapatan, belanja, pembiayaan dan juga kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3. Pengukuran Value For Money

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Konsep *Value for money* sebagai berikut:

3.1 Rasio Ekonomis

Rasio Ekonomis merupakan perbandingan antara realisasi biaya yang di gunakan untuk mendapatkan pendapatan daerah dengan anggaran biaya biaya yang di gunakan untuk menghasilkan Pendapatan Daerah dapat di cari dengan rumus :

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

Ketentuan :

- 1) Jika < 100% maka Ekonomis
- 2) Jika > 100% maka tidak Ekonomis
- 3) Jika = 100% maka Ekonomis Berimbang

Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintahan Daerah Kabupaten Bener

Meriah tahun 2011 sampai 2015 sebagai Berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2011} &= \frac{319.744.499.712}{341.515.176.031} \times 100\% \\ &= 93,62\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{371.059.851.344}{399.531.492.545} \times 100\% \\ &= 92,87\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{368.944.879.285}{387.906.835.902} \times 100\% \\ &= 95,11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{470.936.834.356}{502.267.481.611} \times 100\% \\ &= 95,76\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{583.911.772.555}{615.024.641.984} \times 100\% \\ &= 94,94\% \end{aligned}$$

Pengukuran Kinerja ekonomi dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

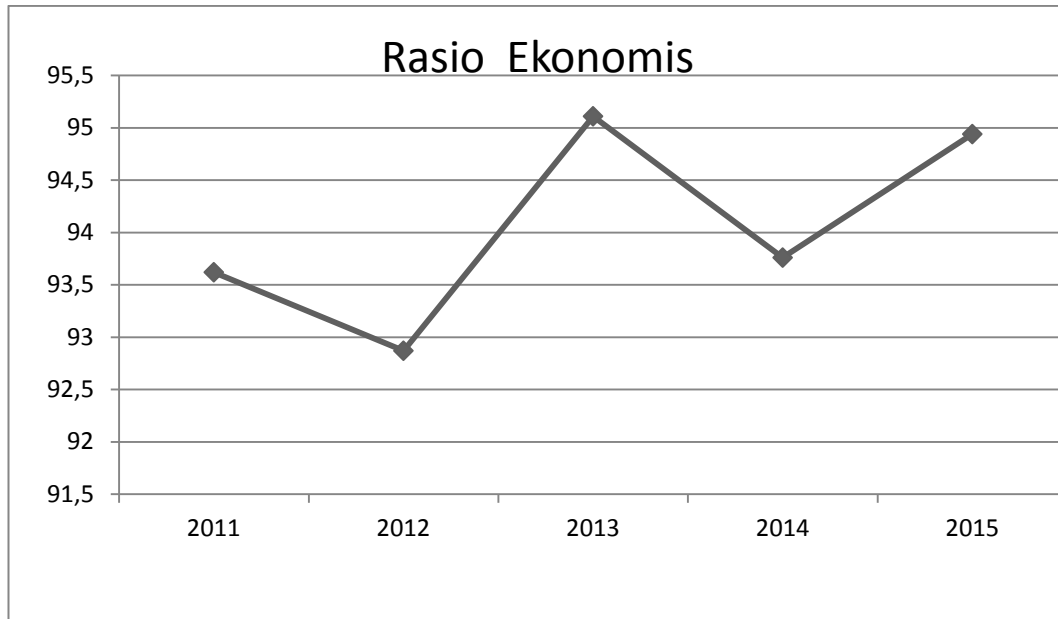
Tabel IV.4
Rasio Ekonomis
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Ekonomis	Kriteria
2011	341.515.176.031	319.744.499.712	93,62	Ekonomis
2012	399.531.492.545	371.059.851.344	92,87	Ekonomis
2013	387.906.835.902	368.944.879.285	95,11	Ekonomis
2014	502.267.481.611	470.936.834.356	93,76	Ekonomis
2015	615.024.641.984	583.911.772.555	94,94	Ekonomis

Sember : Data di Olah oleh peneliti

Pada tabel di atas dapat di lihat bahwa pengukuran kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2011 sampai 2015 tidak mengalami perubahan kriteria, Setiap tahunnya tergolong kriteria

Ekonomis. Pada tahun 2011 Kinerja Keuangan pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah telah memenuhi kriteria Ekonomis hal ini di tunjukkan dengan data target anggaran belanja daerah sebesar 341.515.176.031 dan Realisasinya sebesar 319.744.499.712 dengan persentase 93,62% dan tergolong ekonomis karena persentase berada di bawah 100% . Pada tahun 2012 Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten bener meriah menunjukkan target anggaran sebesar 399.53149.545 dan Realisasinya 371.059.851.344 dengan persentase 92,97% mengalami penurunan di dibandingkan dengan tahun 2011,tetapi walaupun menurun rasio ekonomis pada tahun 2012 masih tergolong ekonomis karena persentasenya berada di bawah 100%. Pada tahun 2013 kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah kembali mengalami kenaikan di dibandingkan dengan tahun 2012, hal ini di lihat dari target anggaran sebesar 387.906.835.902 dan realisasi 368.944.879.285 dengan persentase 95,11% dan masih tergolong dalam kriteria ekonomis karena persentasenya kurang dari 100%. Pada tahun 2014 target anggaran sebesar 502.67.481.611 dan realisasinya 470.936.834.356 dengan persentase 93,76% dan masih tergolong ekonomis karena persentasenya masih kurang dari 100%. Pada tahun 2015 Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah juga mengalami kenaikan di dibandingkan tahun 2014, hal ini di lihat dari target anggaran sebesar 615.04.641.984 dan realisasi 583.911.77.555 dengan persentase 94,94% dan masih tergolong dalam kriteria Ekonomis karena persentasenya kurang dari 100%.



Gambar V.1 Grafik Rasio Ekonomis

3.2 Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan untuk menggambarkan perbandingan antara Realisasi biaya dengan realisasi pendapatan. Rasio efisiensi di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan :

- 1) Jika > 100% maka tidak Efisien
- 2) Jika 90-100% maka Kurang Efisien
- 3) Jika 80-90% maka cukup Efisien
- 4) Jika 60-80% maka Efisien
- 5) Jika < 60% maka Efisien

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah pada tahun 2011 sampai tahun 2015 berdasarkan rasio efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2011} &= \frac{319.744.499.712}{381.867.677.865} \times 100\% \\ &= 83,73\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{371.059.851.344}{448.856.002.163} \times 100\% \\ &= 82,67\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{368.944.879.285}{525.853.728.871} \times 100\% \\ &= 70,16\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{470.936.834.356}{721.884.041.333} \times 100\% \\ &= 65,23\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{583.911.772.555}{831.365.323.105} \times 100\% \\ &= 70,23\% \end{aligned}$$

Penilaian Kinerja efisiensi dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

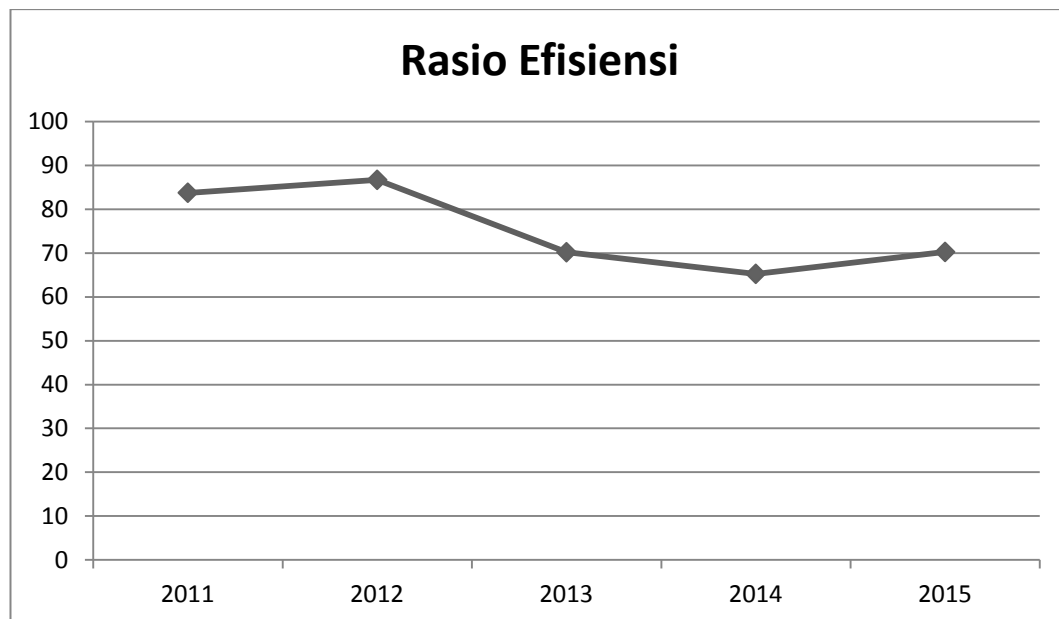
Tabel IV.5
Rasio Efisiensi
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Efisiensi	Kriteia
2011	436.769.779.981	319.744.499.712	83,73	Cukup Efisien
2012	448.856.002.163	371.059.851.344	86,67	Cukup Efisien
2013	525.853.728.871	368.944.879.285	70,16	Efisien
2014	721.884.041.333	470.936.834.356	65,23	Efisien
2015	831.365.323.105	583.911.772.555	70,23	Efisien

Sumber : Data di olah oleh peneliti

Pada tabel di atas menunjukkan pengukuran kinerja pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di lihat dari kriteria efisiensi adalah mengalami perbaikan. Pada tahun 2011 Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah di lihat dari realisasi pendapatan daerah sebesar 436.769.779.981 dan realisasi belanja daerah sebesar 319.744.499.712 dengan persentase rasio efisiensi 83,73% , hal ini tergolong cukup efisien karena persentasenya berada di antara 80-90%. Pada tahun 2012 persentase rasio ekonomis pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah dilihat dari realisasi Pendapatan daerah sebesar 448.856.002.163 dan realisasi belanja 371.059.851.344 dengan persentase rasio efisiensinya 86,87%, hal ini tergolong cukup efisien karena persentasenya berada di antara 80-90%. Pada tahun 2013 persentase rasio efisiensi pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah menurun di bandingkan dari tahun 2012 hal ini di lihat dari pendapatan daerah sebesar 525.853.728.872 dan realisasi belanja daerah 368.944.879.85 dengan persentase rasio efisiensinya sebesar 70,16%. Walaupun menurun dari tahun sebelumnya hal ini tergolong efisien karena persentasenya berada diantara 60-80%. . Pada tahun 2014 rasio efisiensi pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan dari tahun 2013 yang mana pendapatan daerah sebesar 721.884.041.333 dan belanja daerah 470.936.834.356 persentase efisiensinya sebesar 65,23% dan hal ini tergolong efisien karena persentasenya berada diantara 60-80%. Pada tahun 2015 rasio efisiensi pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah dilihat dari realisasi pendapatan sebesar 831.365.323.105 dan realisasi belanja 583.911.772.555 dengan rasio efisiensinya sebesar 70,23% dan

mengalami peningkatan dari tahun 2014, hal ini tergolong efisien karena persentasenya berada diantara 60-80%.



Gambar V.2 Grafik Rasio Efisiensi

3.3 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bener meriah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang di rencanakan di bandingkan dengan target yang telah di tetapkan berdasarkan potensi nilai riil daerah, rasio efektivitas di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan

- 1) Jika > 100% maka Sangat Efektif
- 2) Jika 90-100% maka Efekif
- 3) Jika 80-90% maka Cukup Efektif

4) Jika 60-80% maka Kurang Efektif

5) Jika < 60% maka Tidak Efektif

Rasio efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2011} &= \frac{436.769.779.981}{467.947.586.986} \times 100\% \\ &= 93,33\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2012} &= \frac{448.856.002.163}{495.532.780.976} \times 100\% \\ &= 90,58\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2013} &= \frac{525.853.728.871}{539.963.344.991} \times 100\% \\ &= 97,37\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2014} &= \frac{721.884.041.333}{745.955.340.435} \times 100\% \\ &= 96,77\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2015} &= \frac{831.365.323.105}{853.475.688.233} \times 100\% \\ &= 97,40\%\end{aligned}$$

Pengukuran Kinerja efektivitas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

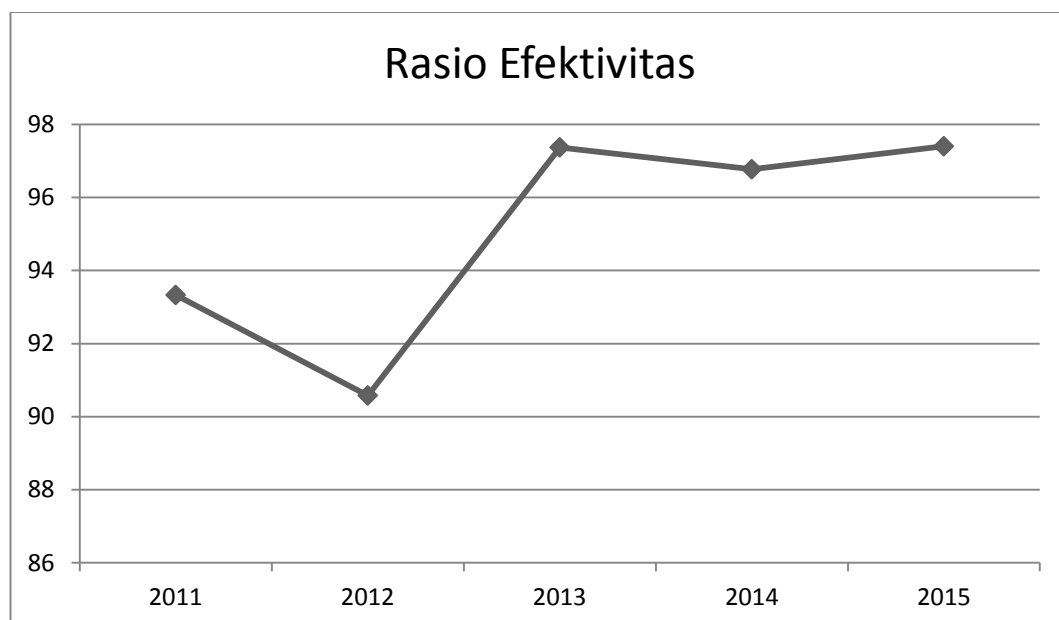
Tabel IV.6
Rasio efektivitas
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011-2015

Tahun	Anggran Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efektivitas	Kriteria
2011	467.947.586.986	436.769.779.981	93,33	Efektif
2012	495.532.780.976	448.856.002.163	90,58	Efektif
2013	539.963.344.991	525.853.728.871	97,37	Efektif
2014	745.955.340.435	721.884.041.333	96,77	Efektif
2015	853.475.688.233	831.365.323.105	97,40	Efektif

Sumber : data di olah peneliti

Pada tabel di atas menunjukkan pengukuran kinerja pemerintah daerah kabupaten bener meriah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di lihat dari kriteria efektivitas adalah efektif. Pada tahun 2011 rasio efektivitas pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah dilihat dari anggaran pendapatan daerah sebesar 467.947.586.986 dan realisasinya 436.769.779.981 dengan persentase efektivitasnya Sebesar 93,33% hal ini tergolong efektif karna persentasenya di antara 90-100%. Pada tahun 2012 rasio ekonomis pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan di bandingkan tahun 2011 yang mana target pendapatan daerah sebesar 495.532.780.976 dan realisasinya 448.856.002.163 yang mana persentase efektivitasnya sebesar 90,58% dan hal ini tergolong efektif karena persentasenya di atas 90%. Pada tahun 2013 rasio ekonomis pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun 2012 yang mana persentase tahun 2013 sebesar 97,37% hal ini di sebabkan target pendapatan daerah 539.963.344.991 lebih besar di bandingkan realisasinya 525.853.728.871 dan hal ini tergolong

efektif karena persentasenya berada di antara 90-100%. Pada tahun 2014 rasio ekonomis pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah lebih rendah di bandingkan tahun 2013 yang mana persentase tahun 2014 sebesar 96,77% hal ini di sebabkan target pendapatan daerah 745.955.340.435 lebih besar di bandingkan dengan realisasinya 721.884.041.333 dan hal ini masih tergolong efektif karena persentasenya berada di atas 90%. Pada tahun 2015 rasio ekonomis pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah mengalami kenaikan di bandingkan dengan tahun 2014 yang mana persentase tahun 2015 sebesar 97,40% di sebabkan karena target anggaran pendapatan daerah 853.475.688.233 lebih besar di bandingkan realisasinya 831.365.323.105, dan hal ini tergolong efektif karena persentasenya berada di atas 90%.



Gambar V.3 Grafik Rasio Efektivitas

Target anggaran dan realisasi APBD dari tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah berdasarkan pengukuran dengan konsep *Value for money* belum sepenuhnya memenuhi unsur yang ada di dalam konsep *Value for money* sehingga kurang terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran.

B. Pembahasan

1. Pengukuran Kinerja keuangan Pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah Berdasarkan *value for money*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah periode tahun 2011 sampai tahun 2015 menggunakan metode *Value for money*. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah daerah tidak bisa di nilai dari sisi output yang di hasilkan, tetapi secara integritas mempertimbangkan input, output dan outcome secara bersama-sama. Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah, (Mardiasmo,2009:7).

Peraturan pemerintah No 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang hendak di laksanakan atau yang telah di capai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

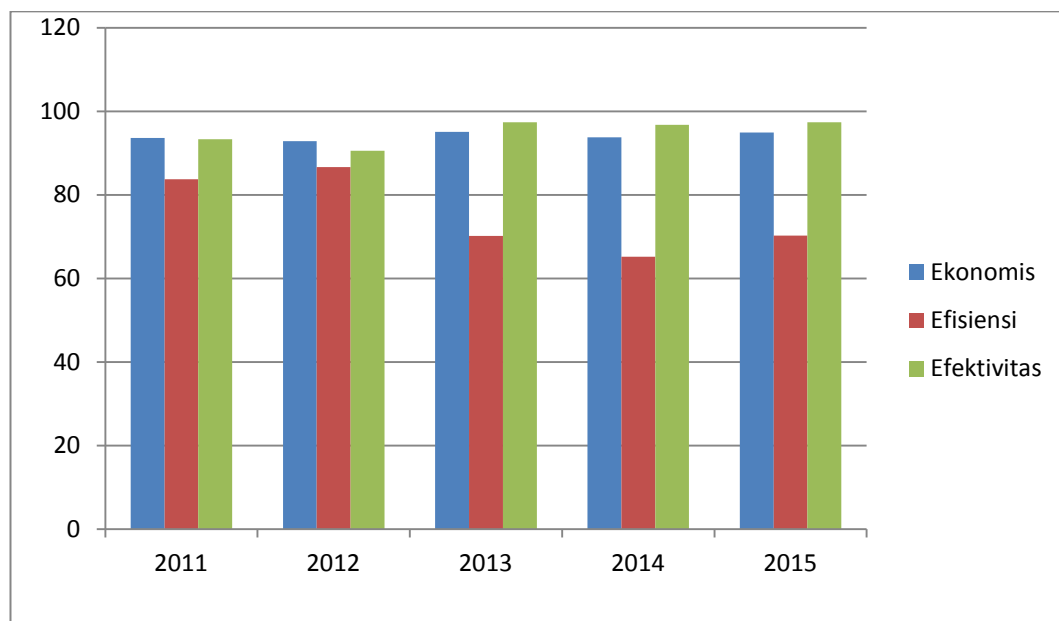
Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kinerja keuangan memenuhi kriteria Ekonomis, hal ini di karenakan realisasi biaya yang lebih rendah di bandingkan dengan biaya yang di anggarkan sehingga rasio ekonomis dari tahun 2011 sampai 2015 berada di antara 90-100%. Walaupun rasionya setiap tahunnya mengalami fluktuasi tetapi tidak dengan anggaran belanja dan realisasi belanjanya yang mana target belanja dan realisasinya tahun 2011 sampai 2015 selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa belanja yang di keluarkan pemerintah daerah setiap tahunnya

semakin besar dan juga mengakibatkan rasio ekonomis juga mengalami peningkatan hal ini termasuk tidak baik.

Dengan meningkatnya rasio ekonomis setiap tahunnya menunjukkan bahwa belanja yang di keluarkan pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah semakin besar yang mana Menurut Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani semakin kecil rasio ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariasih (2009) yaitu rasio ekonomis tergolong ekonomis karena rasionya berada di antara 90-100%.

Dari tahun 2011 dan 2012 dari kriteria efisiensi Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah berada di katagori cukup efisien yang persentase rasionya berada diantara 80-90% sedangkan tahun 2013 sampai tahun 2015 tergolong efisien hal ini di sebabkan karena persentase rasio efisiensi tahun 2011 sampai tahun 2015 persentasenya berada di antara 60-80%, Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani menyatakan semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Sedangkan katagori efisien itu berada di dalam persentase di bawah 90%. Walaupun pada tahun 2013 rasio efisiensi mengalami penurunan tetapi tidak dengan realisasi pendapatan dan realisasi belanjanya yang mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya rasio efisiensi maka perbandingan belanja daerah dengan pendapatan daerah tidak terlalu besar dan menunjukkan bahwa belanja besar yang di keluarkan pemerintah tidak dapat menghasilkan pendapatan daerah yang besar juga. Hasil penelian ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2012) dan Ariasih (2009) dengan hasil rasio efisiensinya tergolong kurang efisien.

Untuk pengukuran dari efektivitas dari tahun 2011 sampai 2015 tergolong efektif karena persentasenya berada di antara 90-100%, yang mana target dan realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya apabila persentase berada diatas 100% maka kinerja tergolong sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah kabupaten Bener Meriah semakin baik karena pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, Menurut Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani semakin besar rasio ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2012) dan Ariasih (2009) yaitu dengan hasil rasio efektivitasnya tergolong efektif karena rasionya berada di antara 90-100%. Dari penjelasan di atas mengenai konsep *Value for money* pemerintah Daerah kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada gambar garfik di bawah ini :



Gambar V.4 Grafik konsep Value for Money

2. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Belum Terwujudnya *Value For Money* Dalam Pengelolaan APBD Kabupaten Bener Meriah.

Dari penelitian yang telah dilakukan masing-masing rasio dalam konsep *value for money* tergolong baik, tetapi berdasarkan perhitungan yang dikaitkan dengan teori, kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten bener meriah berlawanan dengan teori, yang mana rasio ekonomis mengalami peningkatan, sedangkan berdasarkan teori Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani semakin kecil rasio ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik, rasio efisiensi juga mengalami peningkatan dan berlawanan dengan teori Mardiasmo semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Akan tetapi rasio efektivitas mengalami peningkatan sesuai dengan teori Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani semakin besar rasio efektivitas maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik, tetapi Pendapatan daerah yang terealisasi tidak pernah mencapai target maupun melebihi target yang di anggarakan.

Faktor-faktor yang menyebabkan belum terwujudnya pengukuran konsep *Value for money* dalam pengelolaan APBD adalah :

- a) Dimana rasio ekonomis mengalami peningkatan karena di sebabkan oleh meningkatnya jumlah belanja daerah baik yang ditargetkan maupun yang terealisasi, yang di antaranya belanja operasional (belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan), belanja modal (belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja jalan/irigasi/jaringan, dan belanja aset tetap lainnya) dan belanja tak terduga. Dengan meningkatnya rasio ekonomis

menunjukkan pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah kurang mampu dalam penghematan belanja daerah khususnya untuk belanja operasi.

- b) Rasio efisiensi mengalami peningkatan karena realisasi pendapatan dan realisasi belanja meningkat setiap tahunnya, yang mana meningkatnya rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan karena belanja daerah yang di keluarkan masih sangat banyak di gunakan sedangkan perbandingan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah tidak cukup signifikan.
- c) Rasio efektivitas mengalami peningkatan hal ini menunjukkan efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan hal ini di sebabkan karena besarnya target dan realisasi pendapatan mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mana pendapatan daerah kabupaten Bener Meriah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang syah), Pendapatan Transfer (dana perimbangan, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi khusus, dana alokas umum, dana pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi) dan lain-lain pendapatan daerah yang syah (pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya), akan tetapi realisasi pendapatan daerah tidak pernah melebihi target hal ini disebabkan karena sumber pendapatan daerah tidak sepenuhnya memberikan pemasukan terhadap pendapatan daerah.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Peneliti sebelumnya, oleh Demi Aulia Arfan (2014), yang mana hasil penelitiannya mengenai Kinerja Dinas Pertanian Daerah Yogyakarta menunjukkan bahwa Rasio Ekonomi dapat diketahui periode tahun 2011 dan 2012 Dinas Pertanian Daerah Yogyakarta telah mampu melaksanakan seluruh program dengan ekonomis, Dari Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Daerah Yogyakarta telah melaksanakan program dengan efisien, sementara Rasio Efektivitas Dinas Pertanian Daerah Yogyakarta telah melaksanakan program dengan efektif dengan rasio efektivitas mencapai 100%.

3. Dampak Pengukuran Berdasarkan Konsep *Value For Money* Terhadap APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah

Dari hasil penelitian pengukuran menggunakan konsep *Value for money* terhadap APBD yang direncanakan pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah periode tahun 2011-2015, maka dampak yang ditimbulkan berdasarkan konsep *Value for money* adalah sebagai berikut :

- a) Akan berdampak terhadap penyusunan APBD di tahun selanjutnya yang mana berdasarkan data pertumbuhan APBD setiap tahunnya tidak signifikan.
- b) Berdampak terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah kabupaten Bener Meriah.

Yang mana pertumbuhan ekonomi masyarakat akan berpengaruh terhadap APBD baik dari segi pendapatan yaitu masyarakat akan membayar pajak untuk menambah pendapatan daerah, dan dari segi belanja daerah berupa

pelayanan yang di berikan kepada masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat.

- c) Akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat yaitu berupa pelayanan Khususnya Pendidikan dan Kesehatan, keamanan, transportasi publik, infrastruktur seperti jalan yang bagus untuk mencapai daerah terpencil dan Peneyediaan barang kebutuhan publik seperti penyediaan bahan baku untuk kebutuhan pokok masyarakat.
- d) Berdampak terhadap surplus atau defisit yang mana akan berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

Berdasarkan dampak yang terjadi di atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah agar keuangan Ekonomis, Efisien, dan Efektivitas adalah :

- a) Meningkatkan sumber pendapatan daerah khususnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan Pendapatan Daerah dengan cara mengelola dan memanfaatkan hasil kekayaan daerah agar mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat.
- b) Menekan biaya untuk belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan) dan meningkatkan belanja modal (belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja jalan/irigasi/jaringan, dan belanja aset tetap lainnya) agar kualitas pelayanan yang di berikan seimbang dengan belanja yang di keluarkan pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengukuran berdasarkan *Value for money* terhadap APBD pemerintah daerah kabupaten Bener meriah masih termasuk belum sepenuhnya baik, karena salah satu indikator pengukurannya yaitu rasio efisiensi tergolong kurang efisien disebabkan karena perbandingan pendapatan daerah dengan belanja daerah kurang signifikan yang menyebabkan rasio berada di kisaran 90-100% dan tergolong kurang efisien , sedangkan rasio ekonomis dan rasio efektivitas sangat baik karena masing-masing tergolong kategori ekonomis dan efektif.
2. Dampak dari pengukuran dengan konsep value for money terhadap APBD pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah adalah terhadap penyusunan APBD tahun selanjutnya, pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, pelayanan kepada masyarakat, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah seharusnya menggunakan pengukuran konsep *Value for money* agar mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap APBD baik dari segi pendapatan daerah dan belanja daerah dan dapat di gunakan sebagai landasan untuk menyusun APBD tahun yang akan datang.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan konsep *Value for money* dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kabupaten saja tetapi lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & syam Kusufi (2012) “Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntans Sektor Publik”. Jakarta: Salemba Empat.
- Agus Pramono Adi Putra dan Ni Gusti Putu Wirawati (2015) “*Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Tabanan*”. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN:2302-8556.
- Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani. (2015)“*Akuntansi Sektor publik*” Bandung: Ciptapustaka
- Azuar Juliandi, Irfan dan Sapri Manurung. (2014) “*Metode Penelitian Bisnis*”.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Deddi Nordiawan dan Hertianti (2010) “*Akuntansi Sektor Publik*”. Jakarta:Salemba Empat
- Deddi Nordiawanm, Iswahyudi dan Maulidah Rahmawati.(2008) “*Akuntansi Pemerintahan*” Jakarta: Salemba Empat
- Demi Aulia Arfan (2014) “*Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012*”. Skripsi UNY.
- Joko Pramono. (2014). “*Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya*”. Skripsi STIE AMA Salatiga.
- Mahmudi.(2011) “Manajemen Keuangan Daerah” PT. Erlangga:Jakarta
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik 2009*. Yogyakarta: CV ANDI Medan:Umsu Press.
- Muhammad Mahsun (2012) “*Pengukuran Kinerja Sektor Publik*” Yogyakarta: BPF
- Muindro Renyowijoyo.(2008) “*Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*” Jakarta:Mitra Wacana Media
- Riki Hamdani. (2016) .“*Analisis Velue For Money dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Sugiyonos. (2012). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabet.